

# Opini Tidak Wajar, DPRD Bentuk Panja

**SUNGAI RAYA.** Opini Tidak Wajar yang didapat Pemkab Kubu Raya dari hasil audit keuangan BPK, membuat DPRD Kubu Raya membentuk panitia kerja (panja).

"Panja tersebut akan menindaklanjuti hasil temuan BPK untuk dikoreksi, terutama beberapa rekomendasi dari hasil audit tersebut, sebagai upaya perbaikan agar di tahun berikutnya Pemkab Kubu Raya dapat meraih

opini lebih baik dari ini," ungkap Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo kepada sejumlah wartawan, Kamis (14/7).

Menurutnya, sesuai Permendagri No. 13 tahun 2010, maka DPRD akan menindaklanjuti hasil audit yang telah diserahkan ke DPRD. Apalagi semua keuangan SKPD dinilai tidak wajar oleh BPK.

Lantas, apa solusi yang akan ditawarkan dewan agar di ta-

hun mendatang, Pemkab dapat meraih opini terbaik secara bertahap, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pembentukan panja hanyalah untuk mencari alternatif solusi dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah "Sebagai upaya pencapaian terbaik dalam pemeriksaan administrasi keuangan daerah oleh BPK," kata legislator PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Ketua Panja,

Suprpto, mengungkapkan beberapa temuan pada keuangan Pemkab Kubu Raya, antara lain dari aset daerah, seperti masih banyaknya bangunan sekolah yang tidak memiliki sertifikat. "Memang bukan kesalahan fatal, akan tetapi harus menjadi perhatian khusus Pemkab. Karena itu, kita akan mengkaji kesalahan yang terjadi yang kemudian hasilnya kita rekomendasikan ke Pemkab."

ucapnya.

Menurut dia, penilaian tidak wajar bukan berarti tiap SKPD tidak mampu menjalankan tugasnya. Hal itu dimaklumi karena Kubu Raya juga masih berbenah karena baru empat tahun terbentuk menjadi kabupaten.

Dia mengusulkan Bupati memberikan teguran atau saran kepada tiap SKPD untuk memotivasi dalam menindaklanjuti opini dari BPK. (oen)